



KANTOR
PUPATI PASURUAN

LAMPIRAN IV

KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENYELARASAN DAN DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

FORM 1

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO.	RPJMD TAHUN 2025 - 2029				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025					KETERANGAN	
	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN		TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	82,19	1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	82,19	
	1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan Daerah (IKD)	Indeks	61,07	1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan Daerah (IKD)	Indeks	61,07	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangda)	Indeks	63,25			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangda)	Indeks	63,25	
	2	Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,324	2	Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,324	
2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi*	Persen	4,23 - 5,45	2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi*	Persen	4,23 - 5,45	
			Rasio Gini	Rasio	0,317 - 0,357			Rasio Gini	Rasio	0,317 - 0,357	
			Indeks Ekonomi Berkelanjutan	Indeks	72,61			Indeks Ekonomi Berkelanjutan	Indeks	72,61	
			Tingkat Kemiskinan	Persen	7,1 - 8,12			Tingkat Kemiskinan	Persen	7,1 - 8,12	
	1	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio	60,68	1	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio	60,68	

NO.	RPJMD TAHUN 2025 - 2029					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025					KETERANGAN	
	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
			Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,43-4,42			Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,43-4,42		
			Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	0,57-1,82			Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	0,57-1,82		
	2	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)	Persen	27,80 - 30,16		2	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)	Persen	27,80 - 30,16	
			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio	6,01			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio	6,01		
			Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	68,79			Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	68,79		
	3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,76		3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,76	
			Potensi Penurunan Emisi GRK	eq ton CO2	4226,12			Potensi Penurunan Emisi GRK	eq ton CO2	4226,12		
			Indeks Risiko Bencana	Indeks	108,38			Indeks Risiko Bencana	Indeks	108,38		
	4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan jaminan sosial masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	122,23 - 130,33		4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan jaminan sosial masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	122,23 - 130,33	
			Rasio Kewirausahaan	Persen	2,05			Rasio Kewirausahaan	Persen	2,05		
			Persentase PPKS	Persen	2,39			Persentase PPKS	Persen	2,39		
3	Meningkatnya daya saing daerah		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,48	3	Meningkatnya daya saing daerah		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,48	
	1	Meningkatnya SDM yang unggul dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,28 - 72,88		1	Meningkatnya SDM yang unggul dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,28 - 72,88	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,37 - 4,43			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,37 - 4,43		

NO.	RPJMD TAHUN 2025 - 2029					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025					KETERANGAN	
	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
			Prevalensi Ketidacukupan Pangan	Persen	7,18			Prevalensi Ketidacukupan Pangan	Persen	7,18		
	2	Meningkatnya inovasi daerah dan penguasaan teknologi informasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	68,93		2	Meningkatnya inovasi daerah dan penguasaan teknologi informasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	68,93	
			Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,12			Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,12		
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,2	4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,2	
			Indeks Integritas	Indeks	71,9			Indeks Integritas	Indeks	71,9		
	1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	Nilai AKIP	Nilai	78,67		1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	Nilai AKIP	Nilai	78,67	
			Opini BPK	Opini	WTP			Opini BPK	Opini	WTP		
	2	Meningkatnya partisipasi stakeholder dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	61,03		2	Meningkatnya partisipasi stakeholder dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	61,03	
	3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik yang humanis	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,58		3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik yang humanis	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,58	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,94			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,94		
			Indeks SPBE**	Indeks	-			Indeks SPBE**	Indeks	-		
			Indeks Pemerintah Digital	Indeks	1,6-1,92			Indeks Pemerintah Digital	Indeks	1,6-1,92		

Ket : * target tahun 2026 ditentukan oleh Prov. Jatim sesuai Rakortekrenbang untuk indikator makro : Perumbuhan ekonomi, Rasio Gini, Kemiskinan, TPT, Potensi Penurunan GRK.
 ** instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan

FORM 2
KESELARASAN KESEPAKATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2025
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	1.01	BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	150	150	
					1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	13850	13850	KPU
					1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	160	160	
					1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	
					1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	22	22	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.02	KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	0	0	
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	4	
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	4	
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	4	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	4	
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	4	
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	4	
							1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menula	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	4	
							1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menula	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	4	
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	36	36	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	36	36	
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	36	36	
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	36	36	
							1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	4	4	
							1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	4	4	
							1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	4	4	
							1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	4	4	
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	133	133	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	133	133	
							1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	133	133	
							1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	133	133	
	1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0	0	
		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	8	5	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	25	25	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	300	300	
			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	
			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	100	40	
					1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	0	10	
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	2	1	
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	12	0	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.05	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	0	
					1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1	
	1.06	BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduas	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	4	4	
					1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	1	
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	9040	9040	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
		BIDANG TENAGA KERJA											
	2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	0	0	
					2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	0	0	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	1	1	
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	45	43	
	2.09	BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	0	3	
					2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	0	2	
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	laporan	0	2	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.10	BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif masyarakat.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	
					2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	0	1	
	2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkuali	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	0	34	
					2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	0	0	
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	0	47847	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	0	0.25	
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	111466	111466	
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten /kota atau TPA/TPST Regiona	Ton	8591	47847	
	2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	0	0	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipi	Laporan	0	0	
	2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang	Unit	100	100	
					2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	
	2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2	2	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	0	0	
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	5	5	
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga (Bina Keluarga (Bina Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	0	0	
	2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	80	80	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/indikator	Media	128	128	
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2	2	
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1	
					2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi	Laporan	3	3	
					2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	12	12	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1	1	
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	55	55	
	2.17	BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif masyarakat	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	10	10	
					2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	20	20	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.17.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	0	0	
					2.17.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usah	0	0	
	2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	4	20	
					2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	Kegiatan Usaha	25	120	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.20	BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraa n Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	0	0	
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	%	30	30	
	2.21	BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	55	55	
					2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	1	1	

[illegible]

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.25	BIDANG PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	75	80	
					3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	3	3	
					3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	0	3	
					3.25.03	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	0	3004	
					3.25.03	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	0	112	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					3.25.03	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	4	30	
					3.25.03	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	0	18	
	3.26	BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasiona	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	40	40	
					3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	4	4	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUA	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUA	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	1	1	
					3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	1	1	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
	3.27	BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokas	Laporan	12	12	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
							3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokas	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokas	Laporan	22	12	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokas	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	22	12	
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	3	
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	3	
	3.30	BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	0	0	
					3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	2800	2800	
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	30	30	
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	4	4	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	4	
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	1	

NO.	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala	Dokumen	1	1	
	3.32	BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	0	0	
							3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	0	0	
					3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	0	0	

FORM 5

DAFTAR KESELARASAN

SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90 - 5,40	4,23 - 5,45	4,23 - 5,45	
2	PDRB Per Kapita (juta)	80,10 - 90,71			
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	14.2			
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,95 - 9,10	7,1 - 8,12	7,1 - 8,12	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,70 - 4,48	5,37 - 4,43	5,37 - 4,43	
6	Rasio Gini	0,370 - 0,380	0,313 - 0,353	0,317 - 0,357	
7	Indeks Pembangunan Manusia*	0,64 - 0,65	72,28 - 72,88	72,28 - 72,88	
8	Persentase Penurunan Emisi GRK (ton CO2 eq)	1 - 2,17	4,226.12	4,226.12	Menggunakan satuan ton CO2 eq
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,08 – 74,25			

Keterangan : *Provinsi Jawa Timur menggunakan Indeks Modal Manusia (nilai)

FORM 6
DAFTAR KESELARASAN
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

NO.	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)		(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
1		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,68	1		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,99	
2		Kesehatan Ibu dan Anak:						
	-	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	109	2	-	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	74,41 - 85,81	
	-	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,5		-	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,73	
3	-	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	252	3				
	-	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)			-	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) (%)	90	
	-	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)			-	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate) (%)	90	
4		Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,7	4		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	
5		Hasil Pembelajaran:						
	a)	Rata-rata Nilai PISA						
	-	Membaca	396					
	-	Matematika	404					
	-	Sains	416					
	b)	Rata-rata nilai asesmen nasional						
	-	Literasi membaca	65,89		a)	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen literasi (Angka literasi) (%)		
					-	SD/MI	83,85	
					-	SMP/MTS	83,85	

NO.	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)		(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
	-	Numerasi	58,86	5	b)	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen numerasi (Angka Numerasi) (%)		
					-	SD/MI	84,8	
					-	SMP/MTS	84,8	
	c)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,45		c)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,16	
	d)	Harapan Lama Sekolah	13,36		d)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,81	
6		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	34,92	6		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,99	
7		Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	68,5					
8		Tingkat kemiskinan (%)	6,5 - 7,5	7		Tingkat kemiskinan (%)	7,1-8,12	
9		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	8		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	33,51	
10		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	10,4	9		Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	47	
11		Produktivitas Industri dan Pertanian						
	a)	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,2	10	a)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	60,68	
	b)	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)			b)	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,83	
12		Pengembangan Pariwisata						
	a)	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70	11	a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,43 - 4,42	
	b)	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,00 - 24,70		b)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)	33,069	
13		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40-8,00					
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN						
	a)	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	3,15		a)	Proporsi Jumlah Industri Menengah dan Besar	9,39	

NO.	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)		(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
14	b)	Rasio kewirausahaan (%)	3,18	12	b)	Rasio kewirausahaan (%)	2,05	
	c)	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,12		c)	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB (%)	0,72	
	d)	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,26		d)	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	8,14	
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik							
	a)	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,44 - 4,96	11	a)	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,37 - 4,43	
	b)	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95					
16	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)		56,40 - 59,31	12	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)		64,32	
17	Tingkat penguasaan IPTEK							
	a)	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,31					
	b)	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	52	17	a)	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	68,93	
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau							
	a)	Indeks Ekonomi Hijau	71,01	18	a)	Indeks Ekonomi Berkelanjutan (Indeks)	72,61	
	b)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20					
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		41	19	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)		3,48	
20	Biaya Logistik (% PDB)		13,3					
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		29,44	20	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		27,80-30,16	
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)		22, 7					
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan							
	a)	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	21	a)	Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap Jawa Timur (%)	6,39	
	b)	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68,66		b)	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	79,28	
	c)	Persentase Desa Mandiri (%)	23,91		c)	Persentase Desa Mandiri (%)	12,32	
24	Indeks Materi Hukum							
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		1,7	22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)*		-	
					Indeks Pemerintah Digital (Indeks)		1,6-1,92	

NO.	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)		(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
26		Indeks Pelayanan Publik		23		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,58	
27		Korupsi						
	-	Indeks Integritas Nasional	89,17	24	-	Indeks Integritas (Indeks)	71,9	
	-	Indeks Persepsi Korupsi	40					
28		Indeks Pembangunan Hukum	0,7					
29		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	68	25		Persentase pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan (%)	100	
30		Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 – 85,66					
31		Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)		26		Rasio Pajak Daerah dalam PDRB (%)	0,28	
32		Tingkat Inflasi (%)	2,50 ± 1,00	27		Tingkat Inflasi (%)	1,5 - 3,5	
33		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
	a)	Aset Perbankan/PDB (%)	64,51					
	b)	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63					
	c)	Aset Asuransi/PDB (%)	9,3					
	d)	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59,9					
	e)	Total Kredit/PDB (%)	38,46					
34		Inklusi Keuangan (%)	91,5	28		Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	3,06	
35		Asia Power Index (Diplomatic Influence)	65,8	29		Realisasi Investasi (Triliun Rp)	16,51	
36		Asia Power Index (Military Capability)	17	30		ICOR (Rasio)	6,01	
37		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	31		Indeks Kebudayaan Daerah (IKD) (Indeks)	61,07	
38		Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,14	32		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks)	82,19	
39		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83					
40		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,421	33		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,324	
41		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						
		Kualitas Lingkungan Hidup	76,67					
	a)	Indeks Kualitas Udara (IKU)			a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	71,76	
		Indeks Kualitas Air (IKA)						
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)						

NO.	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)		(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
42		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		34				
	b)	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman			b)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6,8	
	c)	Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)			c)	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	16,19	
						Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	25	
43		Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan						
	a)	Ketahanan Energi						
	-	Indeks Ketahanan Energi	6,82					
	b)	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (%)	6,55	35	a)	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,18	
	c)	Ketahanan Air	3,5					
	-	Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	60,16		b)	Rasio Kebutuhan Air baku dan Ketersediaan Air Baku (%)		
					-	Irigasi	73,39	
					-	Air minum	15,65	
	-	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	42,24	36	c)	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	23,05	
44		Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB	0,136	37		Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	108,38	
45		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		38		Potensi Penurunan GRK (Ton CO2 eq)	4226,12	
	a)	Kumulatif	19,07					
	b)	Tahunan	27,35					

Keterangan: *Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan

FORM 7

DAFTAR KESELARASAN KEGIATAN PRIORITAS UTAMA

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1.	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diseminasi Informasi Publik melalui media Cetak dan media Audio Visual
			b. Sub Kegiatan Relasi Media	a. membuat siaran pers b. melaksanakan kegiatan dengan media terkait pemberitaan yang meliputi: - konferensi pers - kunjungan jurnalis/pers - kunjungan ke media - pertemuan dengan pemimpin redaksi - liputan media - melakukan klarifikasi pemberitaan c. melaksanakan kegiatan lainnya dengan media terkait pemberitaan dan/ atau non pemberitaan d. mengelola ruang pers e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan relasi dengan media
2.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan a. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.		Pengembangan Pangan Hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			a. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sosialisasi Asuransi Ternak ke pelaku usaha peternakan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			b. Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			c. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Sertifikasi ternak lokal unggul
			d. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfatan Hasil Produk sebagai sumber protein pangan
			e. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			f. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan benih, bibit ternak dan pakan ternak untuk menjamin produksi ternak
			g. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Bersumber dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
4.		Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			a. Sub Kegiatan Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal	Workshop peningkatan penganekaragaman pangan / Pendampingan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan
				Pelatihan olahan pangan lokal/ Sosialisasi Pangan Beragam Bergizi/ Seimbang dan Aman(B2SA)
5.		Peningkatan penyediaan energi	b. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan dan pemberian bibit ternak ke peternak untuk meningkatkan produksi ternak
6.		Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi	c. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan dan pemberian benih ternak ke peternak untuk meningkatkan produksi ternak

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
7.		Konservasi sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota a. Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian a. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
8.		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan b. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan c. Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
9.		Penyediaan dan Pengawasan Infrastruktur Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman b. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Terpusat Skala Permukiman c. Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
10.		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian a. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengembangan Pertanian Uji dan tanam padi varietas baru
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan a. Sub Kegiatan Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal	Diversifikasi Pangan Lokal Berbasis Sumber Daya Pesisir
				Penguatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Wilayah Pesisir
			b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan	Diversifikasi Pangan Lokal Berbasis Sumber Daya Pesisir

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
11.		Pengelolaan susut dan sisa pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian a. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Edukasi penanganan pascapanen yang tepat
12.		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota a. Sub. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
13.		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kegiatan Sosialisasi, pembinaan, monitoring, terhadap pelaku kegiatan dan/atau usaha
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kegiatan pemrosesan dan penerbitan persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air sungai dan udara ambien untuk perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan kabupaten/kota	Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas air sungai (ONLIMO) dan kualitas udara (SPKUA)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Kegiatan pengambilan contoh dan pengujian sampel air limbah domestik pada IPAL komunal domestik, sebagai evaluasi kinerja IPAL yang sudah terbangun
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup a. Sub Kegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan usaha , Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PROKASIH, Pemantauan kerusakan lingkungan hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN	Pemantauan dalam upaya penghentian sumber pencemar

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup a. Sub Kegiatan Penghentian sumber pencemar	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	
14.		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1. Kegiatan Pengelolaan Sampah a. Sub Kegiatan: Peningkatan Peran Serta Masyarakat b. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran ulang Sampah c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten d. Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
15.		Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1. Kegiatan Pengelolaan Sampah a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus d. Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota e. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan f. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah; g. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah h. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan i. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
16.		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan Olahan Ikan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1. Kegiatan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil/Pelaksanaan a. Sub Kegiatan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
17.		Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya		
18.	Prioritas Nasional 3	Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Program ini bertujuan memangkas rantai distribusi, mengurangi dominasi tengkulak yang menekan harga petani, mengatasi keterbatasan permodalan, serta menekan biaya bagi konsumen.
19.	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD Pembangunan Ruang Kelas Baru b. Sub Kegiatan Penyediaan infrastruktur TIK c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Merupakan Program Pemerintah Pusat dalam rangka Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak usia Dini,Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah atas Umbul

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Prasarana dan Utilitas PAUD d. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD e. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah f. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru g. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah h. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal i. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Garuda serta Digitalisasi Pembelajaran, Prinsip Pelaksanaan Revitalisasi Melibatkan peran Masyarakat/Swakelola.Mekanisme PBJ Satdik:Sekolah akan mengelola dana bantuan secara mandiri dengan pelibatan peran serta masyarakat. Bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk uang kepada satuan pendidikan.Usulan Lembaga Satuan Pendidikan untuk Tahun 2026 antara Lain : 1. KB AL Hidayah Kec. Kejayan 2. TPA AL Hidayah Kec. Kejayan
			j. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD k. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD l. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan m. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan a. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
20.		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	1. Kegiatan Jenjang SD : a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Merupakan Program Pemerintah Pusat dalam rangka Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah c. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah e. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah f. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU g. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah h. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah i. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah j. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar k. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar l. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru m. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah n. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah o. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Satuan Pendidikan Anak usia Dini,Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah atas Umbul Garuda serta Digitalisasi Pembelajaran, Prinsip Pelaksanaan Revitalisasi Melibatkan peran Masyarakat/Swakelola.Mekanisme PBJ Satdik:Sekolah akan mengelola dana bantuan secara mandiri dengan pelibatan peran serta masyarakat Bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk uang kepada satuan pendidikan. Usulan Lembaga Satuan Pendidikan untuk Tahun 2026 antara Lain : 1. SDN Bedomungal II Bangil 2. SDN Gempeng II 3. SDN Kiduldalem I 4. SDN Pogar II 5. SDN Tambakan 6. SDN Beji I 7. SDN Beji IV 8. SDN Gunungsari I 9. SDN Kedungringin II 10. SDN Kenep 11. SDN Sidowayah 12. SDN Bulusari I 13. SDN Gempol I 14. SDN Karangrejo II Gempol 15. SDN Karangrejo III Gempol 16. SDN Watukosek 17. SDN Gayam Gondangwetan 18. SDN Kalirejo 19. SDN Karangsantul I 20. SDN Kersikan Godangwetan 21. SDN Lajuk Gondangwetan 22. SDN Pateguhan Gondangwetan 23. SDN Kalipang I Grati 24. SDN Klangrong I Kejayan 25. SDN Pacarkeling I Kejayan 26. SDN Sladi Kejayan 27. SDN Wangkalwetan 28. SDN Mulyorejo Kraton 29. SDN Selotambak Kraton 30. SDN Wates I Lekok 31. SDN Wates II Lekok 32. SDN Tambaklekok III Lekok 33. SDN Banjarimbo I Lumbang 34. SDN Bulukandang II Lumbang 35. SDN Cukurguling II 36. SDN Karangasem II 37. SDN Karangjati II 38. SDN Pancur I 39. SDN Welulang I 40. SDN Watuprapat III 41. SDN Sumbergedang II Usulan Lembaga Satuan Pendidikan untuk Tahun 2026 antara Lain : 1. SMPN 2 Bangil

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Guru/Kepala Sekolah/TU b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah c. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah d. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium e. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah f. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah g. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah h. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium i. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah j. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru k. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU l. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2. SMPN 1 Gempol 3. SMPN 1 Kejayan 4. SMPN 1 Lekok 5. SMPN 1 Tosari 6. SMPN 4 Tosari
21.		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	m. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan n. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah ATS DO Jenjang SD : 826 SMP : 2016 1. Harus Melibatkan Pemerintah Desa untuk mencenangkan Program kembali bersekolah 2. Kroscek Lapangan Menyesuaikan Kebenaran Data ATS (ada sebagian data ATS DO tersebut Mempunyai NISN Ganda) 3. Mendirikan PKBM
22.		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program prioritas bupati, beasiswa berupa bansos diberikan kepada mahasiswa sebanyak 40 orang dari keluarga miskin (masuk data

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA a. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DTKS/DTSN) untuk kuliah di bidang kebidanan dan keperawatan.
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan a. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	STAI Al-Yasini Wonorejo = 55 Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama = 25 Universitas Yudharta Purwosari = 25 Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama = 20 Universitas Yudharta Purwosari = 20 Universitas NU Surabaya = 43
23.		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			a. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- aspek Sosial	
			2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			a. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			b. Sub Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			c. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			d. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			1. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			a. Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan,	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			pengkajian, dan penerapan	
			b. Sub Kegiatan Inovasi dan Inovasi	
			c. Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
24.		Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 4. Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha a. Sub Kegiatan erbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DINAS KESEHATAN

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan a. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Bidang PAUD dan PNF) b. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (BOP PKG KAB) c. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (BOP IGTKI KAB) d. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (BOP HIMPAUDI KAB) PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1. Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian a. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Komoditas Tehnologi dan Spesifik Lokasi PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1. Kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kab /kota a. Sub Kegiatan Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup satu daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan b. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan c. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1. Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota a. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) b. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga a. Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) b. Sub Kegiatan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			a. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil a. Pelayanan secara aktif Pndaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait pencatatan Sipil PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner a. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga b. Sub Kegiatan Bimbingan Keluarga Sakinah c. Sub Kegiatan Bimbingan Perekonomian Keluarga d. Sub Kegiatan Penyuluhan Masyarakat (Penyuluh Agama) e. Sub Kegiatan Bimbingan Perkawinan	
25.		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan	DINAS KESEHATAN

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan. b. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat c. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
26.		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan. b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DINAS KESEHATAN
27.		Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan b. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat c. Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINAS KESEHATAN

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
28.		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. 1. Kegiatan Penyediaan Fasillitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	DINAS KESEHATAN
29.		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	DINAS KESEHATAN
30.		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi		
31.		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga		
32	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Kelapa	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			a. Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			b. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			1. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan a. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
33.		Hilirisasi Rumput Laut	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
34.	Prioritas Nasional 6	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		
35.	Prioritas Nasional 7	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
36.		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rapat Koordinasi tentang PPID dan SPAN Lapor
			b. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	Sosialisasi Program Prioritas Daerah melalui Mitra Kerja Diskomifo (KIM) tentang Halayak Masyarakat yang terpapar Informasi Publik
			c. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penyebarluasan Informasi Publik melalui media Cetak dan media Audio Visual
			d. Sub Kegiatan Relasi Media	
			e. Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Penyebarluasan Informasi Publik melalui Konten
			f. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Sosialisasi Program Prioritas Daerah melalui Mitra Kerja Diskomifo (KIM)
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASIINFORMATIKA	
			1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Lanjutan Pengembangan Command Center dengan penambahan fungsi fitur announcement dan tracker kendaraan operasional layanan publik
			b. Sub Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			c. Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Lanjutan Pengembangan Command Center dengan penambahan fungsi fitur announcement dan tracker kendaraan operasional layanan publik
			d. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan proses bisnis	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen usulan proses bisnis di Dinas Kominfo
			e. Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Terlaksananya Dukungan Infrastruktur, Aplikasi dan SDM SPBE pada Perangkat Daerah
			f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Lanjutan Pengembangan Command Center dengan penambahan fungsi fitur announcement dan tracker kendaraan operasional layanan publik

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			g. Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Lanjutan Pengembangan Command Center dengan penambahan fungsi fitur announcement dan tracker kendaraan operasional layanan publik
			h. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Penyusunan/reviu arsitektur dan peta rencana SPBE
			i. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Perencanaan/Pemetaan, Pengadaan Infrastruktur, Pengembangan Aplikasi, Integrasi Data, Pelaksanaan Keamanan Informasi, Pelatihan SDM SPBE, Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi
			j. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Layanan yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE
			k. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	mengembangkan SPLP sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan digital
			l. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terwujudnya fasilitasi anggaran /Desk Koordinasi kegiatan SPBE Pemerintah Daerah yang berkesinambungan dan integratif
			m. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya kegiatan/Bimtek/Sosialisasi yang mendukung terwujudnya kabupaten atau Kota Cerdas
			n. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Lanjutan Pengembangan Command Center dengan penambahan fungsi fitur announcement dan tracker kendaraan operasional layanan publik
			o. Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Membutuhkan koordinasi yang baik antar berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyatukan berbagai sistem dan data
			p. Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Rapat Koordinasi dengan inspektorat untuk melakukan audit TIK
			q. Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Sosialisasi/Bimbingan Teknis Inovasi dan Fasilitasi infrastruktur yang sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			r. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek tentang SPBE
			s. Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan AplikasiUmum SPBE	Sub. Kegiatan Koordinasi pemanfaatan AplikasiUmum SPBE
			t. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Lanjutan Pengembangan Command Center dengan penambahan fungsi fitur announcement dan tracker kendaraan operasional layanan publik
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kot	
			a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Bimbingan Teknis/Pendampingan/ Sosialisasi /Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
			b. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Rapat Koordinasi/ desk Pelaksanaan pendataan data statistik sektoral dengan Produsen Data untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan berbasis data dan pengembangan Portal Satu Data
			c. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Menyiapkan SOP agar kegiatan statistik sektoral dapat rilis tepat waktu dan mencantumkan jadwal rilis dalam Rencana Kesepakatan Daftar Data
			d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Pembuatan Dokumen Metadata Statistik Sektoral dan pembuatan Buku Pedoman Pelaksanaan Statistik Sektoral dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
			e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Pendampingan/Sosialisasi/Koordinasi kegiatan Statistik Sektoral untuk mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring	Penerapan SMKI

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumber Daya Teknologi Keamanan Informasi
			c. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Penambahan SDM Keamanan Informasi
			d. Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan CSIRT
			2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1. Sub. Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Pembentukan Aplikasi SMART (Sistem Management Administrasi Perizinan Terpadu) . Sistem aplikasi ini menonjolkan konsep layanan modern, efisiensi dan berbasis digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terintegrasi.
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah b. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga c. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	dalam hal pengembangan aplikasi E-BMD terkait pengelolaan Baranf Milik Daerah
			d. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	dalam hal pengembangan aplikasi perpajakan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penetapan Dokumen Teknis Andalalin 3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto a. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pada Tahun 2026, akan dilaksanakan perbaikan kelembagaan angkutan umum di Kabupaten Pasuruan dimana output yang diharapkan adalah terciptanya pelaksanaan angkutan yang bersubsidi disertai dengan digitalisasi terhadap pelayanan angkutan agar memudahkan masyarakat pengguna angkutan umum. Selain itu, pelayanan pada rekomendasi teknis andalalin, pengujian kendaraan bermotor dan layanan perparkiran akan dilakukan digitalisasi.

FORM 8
DAFTAR KESELARASAN
INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

NAMA KABUPATEN : KABUPATEN PASURUAN

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	Provinsi Jawa Timur	1. Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output:		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. sub kegiatan 1. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan. 2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. 3. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN : Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Sub kegiatan : 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DINAS KESEHATAN	
		- Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis	Kec. Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok, Nguling, Grati	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN / Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil / Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UKM Pengolah dan Pemasar Perikanan	PERIKANAN

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Kabupaten Pasuruan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pelatihan dan Sertifikasi Halal Pelaku usaha hasil ternak
				Kab Pasuruan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
		-	Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional	Kab Pasuruan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
		-	Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);			Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Dapur MBG
		-	Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha	Kabupaten Pasuruan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri / Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota / - Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan IKM

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
			Kabupaten Pasuruan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
		- Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor				
		2. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama			DINAS PENDIDIKAN	DISPENDIK
		3. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output:			DINAS PENDIDIKAN	DISPENDIK
		Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran				DISPENDIK
		- SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran				DISPENDIK
		- SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran				DISPENDIK
		- SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran				DISPENDIK
		- SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran				DISPENDIK
		- SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran				DISPENDIK
		4 Direktif Presiden : Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output				DINKOP UKM

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		- Peningkatan kapasitas usaha koperasi	365 Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI/ Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(1) Pelatihan Manajerial dan Kepemimpinan: Berikan pelatihan kepada pengurus koperasi tentang tata kelola koperasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan berbasis data; (2) Diversifikasi dan Pengembangan Usaha meliputi : Pemetaan Potensi Desa: Identifikasi potensi lokal (produk unggulan desa, SDA, SDM, budaya, dan pariwisata) untuk dikembangkan menjadi unit usaha koperasi; Penambahan Unit Usaha Produktif: Misal : simpan pinjam, perdagangan hasil pertanian, pengolahan makanan, wisata desa, atau produk unggulan daerah; Fasilitasi Permodalan baik internal (Meningkatkan Simpanan Anggota: Tingkatkan kesadaran anggota untuk aktif menabung atau menyetor simpanan wajib dan sukarela), maupun eksternal (Akses Permodalan Eksternal: Ajukan kerja sama atau pembiayaan dari LPDB-KUMKM, CSR perusahaan, atau program pemerintah (KUR, Dana Desa, dll).	DINKOP UKM
		- Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi	365 Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN/ Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota /Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pendidikan Perkoperasian dalam bentuk Bimbingan Teknis bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola tentang Tata Kelola Koperasi Meliputi : Penyusunan Laporan Keuangan bagi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	DINKOP UKM
		Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia				
		5 Direktif Presiden : Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Tuban				
		6 Direktif Presiden : Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output:				

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		- Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur	Kab Pasuruan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Sub Kegiatan :Pembinaan petani pelaku agribisnis tanaman Pangan dan Hortikultura/Pembinaan petani pelaku agribisnis tanaman perkebunan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan : Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sub Kegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
		- Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan				
		- Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
		- Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH)				
		- Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	Kec. Nguling, Lekok, Kraton, Bangil, Rejoso	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP / Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota / Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	- Bimtek Keselamatan Kerja di Laut, Perawatan Mesin dan Perawatan kapal/perahu Perikanan - Pelatihan Mata pencaharian alternatif nelayan - Pelatihan Sertifikasi kecakapan nelayan	DINAS PERIKANAN
		- Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	Beji, Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA / Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil/Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	- Bimtek Budidaya ikan air tawar - Bimtek Penerapan Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB) - Bimtek budidaya ikan air payau - Sekolah Lapang Budidaya Lele	DINAS PERIKANAN
		- Kartu Prakerja				DISNAKER
		- Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha				DINSOS
		- Alat dan mesin pertanian pra panen	Kabupaten Pasuruan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		- Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya	Kabupaten Pasuruan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Pelatihan dan pemberian peralatan olahan hasil peternakan	PETERNAKAN

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		- Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan	Kabupaten Pasuruan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sosialisasi Asuransi ternak pada pelaku Usaha peternakan	PETERNAKAN
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Sub Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan : Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		- Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan	Kec. Nguling, Lekok, Kraton, Bangil, Rejoso	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP / Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota / Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	- Bantuan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan - Bantuan pendukung penangkapan ikan bagi nelayan (cool box)	
		- Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat	Kec. Grati, Beji, Pandaan, Bangil, Rejoso, Kraton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA / Pengelolaan Pembudidayaan Ikan / Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Bantuan paket budidaya air payau - Bantuan Paket Budidaya Ikan Air Tawar - Bantuan Paket Pembenihan ikan air tawar	
		- Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya	Kec. Nguling, Lekok, Kraton, Bangil, Rejoso	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP / Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota / Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Asuransi nelayan/BPJS ketenagakerjaan	
		- Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan				DISPORA
		- Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN)				DINKOP UKM
		7 Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output:				DINAS KESEHATAN/ DINAS SOSIAL
		- Bantuan PBI JKN	KABUPATEN PASURUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEGIATAN : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL	PEMADANAN DATA DI APLIKASI DTKS/DTSEN
		- Kartu Indonesia Pintar	KABUPATEN PASURUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEGIATAN : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL	PEMADANAN DATA DI APLIKASI DTKS/DTSEN

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		- Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	KABUPATEN PASURUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEGIATAN : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINAS SOSIAL	VERIFIKASI BANSOS PKH OLEH PENDAMPING PKH
		- Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	KABUPATEN PASURUAN	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL KEGIATAN : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial SUB KEGIATAN : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DINAS SOSIAL	PAKET SEMBAKO
		- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	KABUPATEN PASURUAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		- Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	KABUPATEN PASURUAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Sub Kegiatan : Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Sub Kegiatan : Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan pokok strategis Sub Kegiatan :Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		- Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran				DISPERINDAG
		- Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik				

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		- Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana	75 Desa Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana		BPBD
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD hanya membuat surat pengantar peyaluran dana desa dalam proses pencarian dana desa (apabila anggaran ini menggunakan Dana Desa)	BPKPD
		- Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial	75 Desa Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana		BPBD
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD hanya membuat surat pengantar peyaluran dana desa dalam proses pencarian dana desa (apabila anggaran ini menggunakan Dana Desa)	BPKPD
		- Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya				DINSOS
	Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan	Pengembangan koridor industri Gresik Surabaya–Sidoarjo–Mojokerto–Pasuruan (sektor industri prioritas: hilirisasi nikel, hilirisasi timah, hilirisasi kelapa, hilirisasi rumput laut, hilirisasi sawit, industri tekstil dan produk tekstil, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, hilirisasi tembaga, industri logam dasar, besi, dan baja);	Kecamatan Bangil dan Pandaan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri / Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota / Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Standarisasi Produk	DISPERINDAG
	Kawasan Pengembangan Industri Malang Singasari-Lawang, dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi (Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger Semeru) • Kota Malang • Kab. Malang • Kota Batu • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kota Probolinggo • Kab. Lumajang	- Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja di Kab. Probolinggo dan Kab. Pasuruan				DINAS PENDIDIKAN/DINAS KETENAGAKERJAAN
		- Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Semeru				BPBD

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Lumajang • Kab. Jember • Kab. Situbondo • Kab. Bondowoso • Kab. Banyuwangi	-	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Bondoyudo, D. I. Sampean Baru, D. I. Baru, D.I Baulmati, D. I. Setail, D. I. Porolinggo, D. I. Setail Teknik, D. I. Bedadung, D. I. Pondok Waluh, D. I. Talang, D. I. Jatiroto, D. I. Pekalen, D. I. Banyuputih, dan D. I. Sampean			
		-	Lahan Garam yang difasilitasi di Kab. Pasuruan	Kec. Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN/Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota/Pengawasan Ekstraksi Garam	Pembinaan usaha garam
		-	Penyiapan calon lokasi dan calon petani penerima			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	Pelatihan dan penguatan kelembagaan petani	KAB. PASURUAN	Sub kegiatan : pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kab/kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Wilayah Kerja UPT PSDA Kab. Pasuruan	Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota	PU SDA CITA	
		-	Penyediaan input dan alat mesin produksi pertanian			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	Pengawasan produksi dan pengendalian OPT/DPI	KAB. PASURUAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sub Kegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi		Program Pengelolaan SDA/Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota/Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	BINAMARGA

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Jaringan irigasi Primer dan sekunder kewenangan Kabupaten		Program Pengelolaan SDA/Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota/Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	PU SDA CITA
		-	Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Desa Mlaten dan Desa Penunggul, Kec. Nguling	Program Redistribusi Tanah. Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee - Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		-	Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Desa Mlaten dan Desa Penunggul, Kec. Nguling	Program Redistribusi Tanah. Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria - Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	
	Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger Semeru (E1) • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Malang • Kab. Lumajang	-	Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah			DISBUNHUT PROV
		-	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH			DISBUNHUT PROV
		-	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH			DISBUNHUT PROV
		-	Pengamanan Kawasan Hutan			DISBUNHUT PROV
		-	Penanganan aduan atas usaha dan/atau kegiatan bidang kehutanan			DISBUNHUT PROV
		-	Pengembangan Hutan Adat			DISBUNHUT PROV

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	Provinsi Jawa Timur	- BMHP untuk Skrining Kesehatan di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur				DINKES
		- Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)				
		- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur				DINSOS /PERKIM
		- Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat				SDA
		- Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan				DP3AP2KB
		- Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan				DINKES
		- Revitalisasi bangunan Satuan PAUD yang mengalami kerusakan				PENDIDIKAN
		- Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD				PENDIDIKAN
		- Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan				PENDIDIKAN
		- Pembangunan unit sekolah baru SD				PENDIDIKAN
		- Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan				PENDIDIKAN
		- Pembangunan unit sekolah baru SMP				PENDIDIKAN
		- Penyediaan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran				PENDIDIKAN

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		- Bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh	Desa Kalirejo, Kec. Kraton	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penanganan kawasan kumuh di Desa Kalirejo, Kec. Kraton	
		- Sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian				DINKES
		- Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	Kec. Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok, Nguling, Grati	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN / Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil / Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UKM Pengolah dan Pemasar Perikanan	
			Kabupaten Pasuruan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Sub Kegiatan : Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		
			Kabupaten Pasuruan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri / Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota / Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi terkait mendapatkan sertifikat halal	DISPERINDAG
			Kabupaten Pasuruan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pelatihan dan Sertifikasi Halal Pelaku usaha hasil ternak	PETERNAKAN DAN KESWAN

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		- Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM	Kec. Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok, Nguling, Grati	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN / Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil / Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UKM Pengolah dan Pemasar Perikanan	
			Kabupaten Pasuruan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri / Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota / Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi terkait mendapatkan sertifikat halal	DISPERINDAG
		- Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal	Kec. Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok, Nguling, Grati	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN / Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil / Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UKM Pengolah dan Pemasar Perikanan	
			Kabupaten Pasuruan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		- Akreditasi lembaga halal				
		- MoU kemitaaan jaminan produk halal	Kec. Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok, Nguling, Grati	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN / Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil / Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UKM Pengolah dan Pemasar Perikanan	
			Kabupaten Pasuruan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri / Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota / Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pembuatan MOU untuk memfasilitasi produk halal	DISPERINDAG
			Kabupaten Pasuruan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		- Peningkatan kapasitas SDM Iptekin				BKPSDM/BAPPELITBANGDA

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		- Penguatan infrastruktur Iptekin strategis				BAPPELITBANGDA
		- Penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin				BAPPELITBANGDA
		- Penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)				BAPPELITBANGDA
		- Penguatan kapasitas Science Techno Park (STP);				BAPPELITBANGDA
		- Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah				BAPPELITBANGDA
		- Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas				BAPPELITBANGDA
		- Pengembangan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN				BAPPELITBANGDA
		- Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas				BAPPELITBANGDA
		- Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir				DINKES
		- Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA				DINKES
		- Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis				DINKES
		- Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis				DINKES
		- Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis				DINKES
		- Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis				DINKES
		- Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis				DINKES

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
		-	Pelestarian Cagar Budaya, ODCB dan OPK	ODCB : Kec.Prigen, Kec. Gempol, Kec. Purwodadi, Kec. Puspo, Kec. Tosari ODCB : Program : PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab./Kota Sub Kegiatan : Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya ; Penetapan Cagar Budaya Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab./Kota Sub Kegiatan : Pelindungan Cagar Budaya OPK : Program : PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya Program : PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Program : PEMBINAAN SEJARAH Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota			
		-	Desa pemajuan kebudayaan				
		-	Pengembangan dan pemanfaatan konten budaya digital				
		-	Penyelenggaraan event film, musik, dan seni	Kec. Pandaan, Kec. Prigen, Kec. Tutur, Kec. Tosari, Kec. Rembang, Kec. Purwodadi	Program : PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		
		-	Fasilitasi dan kemitraan warisan budaya	Kec. Pandaan, Kec. Prigen, Kec.Tosari, Kec. Tutur, Kec. Purwodadi, Kec. Purwosari	Program : PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		- Giat warisan budaya	Kec. Pandaan, Kec. Prigen, Kec. Tosari, Kec. Tuttur, Kec. Purwodadi	Program : PEMBINAAN SEJARAH Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kab./Kota		
		- Peningkatan kebudayaan; kompetensi SDM	Kec. Pandaan, Kec. Prigen, Kec. Gempol, Kec. Beji, Kec. Purwosari, Kec. Purwodadi, Kec. Sukorejo, Kec. Tuttur, Kec. Tosari, Kec. Grati	Program : PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Program : PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
		- Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan	Kec. Pandaan	Program : PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Kegiatan : Pengelolaan Museum Kab./Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum ; SUB Kegiatan :Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		
		- Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya	Kec. Pandaan, Kec. Prigen, Kec. Gempol, Kec. Beji, Kec. Purwosari, Kec. Purwodadi, Kec. Sukorejo, Kec. Tuttur, Kec. Tosari, Kec. Grati	Program : PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya Program : PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		



BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO



KANTOR
BUPATI PASURUAN

